

Fisik Polder Telihan Dikerjakan Bertahap Perlu Anggaran Jumbo, Berharap Bantuan Keuangan Provinsi



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,28/02/2024

BONTANG – Pembebasan lahan untuk kepentingan Polder Terlihan segera dimulai. Sehingga kalau lahan tersedia, maka pembangunan fisik kemungkinan bisa dikerjakan tahun depan.

“Makanya, kita lihat dulu bagaimana proses pembebasan lahannya. Karena pembangunan tidak bisa dimulai kalau pengadaan lahannya tidak beres,” tegas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam.

Ia pun menyebut pembangunan nantinya dilakukan secara bertahap. Mengingat perkiraan anggaran mengacu *detail engineering design* (DED) mencapai Rp300 miliar. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya agar tidak semuanya mengandalkan APBD Bontang. “Bisa juga kami ajukan ke Pemprov,” ucapnya.

Pasalnya fungsi infrastruktur ini, selain untuk penanganan banjir juga sebagai sumber air baku permukaan. Apalagi, penanganan banjir tidak bisa ditangani oleh Pemkot sendiri. Terlebih sesuai *masterplan*, perlu Bendali Suka Rahmat untuk menampung debit air besar dari wilayah hulu.

“Sudah koordinasi dengan Pemprov. Kalau Bendali tetap berproses juga. Saat ini masih dalam perhitungan tanah tumbuh,” tutur dia.

Tentunya membutuhkan waktu lama untuk menunggu Bendali Suka Rahmat. Utamanya, hingga pembangunan fisik rampung. Sebab itu, Polder Telihan ini merupakan salah satu langkah Pemkot sembari menunggu penanganan jangka panjang terakomodasi.

“Paling tidak bisa mengurangi. Sembari membuang secara perlahan ke hilir,” terangnya.

Diketahui, pada Polder Telihan nantinya terdapat beberapa komponen. Meliputi akses jalan masuk gerbang, rumah pompa, rumah jaga, area parkir, kolam lumpur, rumah genset, rumah trafo, akses jalan polder, gudang, gardu PLN, saluran *outlet*, plengsengan, serta jalan *crossing* polder.

Pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran yang tertera untuk nomenklatur tersebut hanya Rp30 juta. Ia menyebut nominal itu memang terbilang kecil. “Pada dasarnya, kami siapkan rumahnya dulu,” sebutnya.

Menurutnya, terkait dengan pengadaan lahan itu harus bersifat *clean and clear*. Nanti ketika persoalan lahan sudah selesai maka anggaran akan ditambahkan melalui APBD Perubahan. Disinggung waktu pelaksanaan yang hanya tiga bulan, ia menjawab durasi itu cukup. Sebab, ketika tahapan sebelumnya sudah rampung maka tinggal pembayaran. “Takutnya ketika dianggarkan nominal besar tetapi akhirnya tidak terserap karena persoalan lahan. Makanya anggaran itu ditarik untuk lainnya terlebih dahulu,” urainya. Ia pun optimistis APBD Perubahan nanti nilainya meningkat. Sehingga, bisa untuk melakukan pembebasan lahan. Ditaksir mencapai Rp500-700 miliar. Sehubungan lahan status area yang rencana dipakai berstatus bekas hutan lindung. Sekarang menjadi area penggunaan lain (APL). (ak/ind/k15)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Fisik Polder Telihan Dikerjakan Bertahap Perlu Anggaran Jumbo, Berharap Bantuan Keuangan Provinsi, 28/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
2. Diatur dalam Pasal 3 PP 19/2021 bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
3. Dalam Pasal 121 PP 19/2021 diatur bahwa pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berseumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.